



PBB-P2 Ditarget Rp 130 Miliar, BPKAD Hadapi Berbagai Tantangan

JOGJA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 130 miliar tahun ini. Angka tersebut naik Rp 5 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Kepala BPKAD Kota Jogja, Raden Roro Andarini, menyebut jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterbitkan mencapai 97.115 lembar, dengan batas pembayaran hingga 30 September 2025. Dari jumlah itu, diharapkan pendapatan pajak dari sektor tersebut bisa mencapai Rp 130 miliar.

Pada tahun 2024, realisasi PBB-P2 mencapai Rp 125 miliar, melampaui target yang ditentukan sebesar Rp 118

miliar dengan capaian 106,44 persen. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kebiasaan wajib pajak yang membayar mendekati jatuh tempo dan banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar daerah.

"Namun seharusnya tidak menjadi kendala, karena pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan secara digital melalui berbagai *platform*," ujarnya, kemarin (5/2).

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto berharap, para wajib pajak bisa membayar PBB-P2 sebelum mendekati jatuh tempo. Sebab salah satu sumber daya pembangunan Kota Jogja berasal dari pendapatan pajak.

Sugeng pun mendorong agar lurah dan mantri bisa turut menyampaikan SPPT PBB-P2

kepada masyarakat. Sehingga capaian pajak pada tahun ini bisa optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang semakin baik.

"Kami pun sudah meningkatkan pelayanan yang luar biasa, sehingga pembayaran pajak sekarang sudah tidak susah," terangnya.

Sementara itu, sebagai wajib pajak Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 6 Jogja Krisbiyantoro berkomitmen untuk segera membayar PBB-P2 tepat waktu. Salah satunya objek PBB-P2 berupa bengkel kereta api Balai Yasa Yogyakarta dengan nilai SPPT tahun ini sekitar Rp 1 miliar.

"Setelah kami menerima SPPT, tentu akan segera kami tindaklanjuti," tegasnya. (inu/wia/fj)